

**GERAKAN MAHASISWA DALAM
MEWUJUDKAN DEMOKRASI DI INDONESIA**
(Studi atas Peranan HMI MPO Cabang Yogyakarta Tahun 1998-2004)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh:

Edy Supri Yanto

NIM: 00540138

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
YOGYAKARTA
2005**

Dr.Siswanto Masruri, M.A.
Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 27 Oktober 2005

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu a'laikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan, arahan dan koreksi, baik dari segi isi maupun tehnik penulisan terhadap skripsi saudara:

Nama : **Edy Supri Yanto**
NIM : **00540138**
Jurusan : **Sosiologi Agma**
Judul : **GERAKAN MAHASISWA DALAM MEWUJUDKAN
DEMOKRASI DI INDONESIA (Studi atas Peranan
HMI MPO Cabang Yogyakarta Tahun 1998-2004)**

maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut dapat diajukan dalam waktu dekat ke Sidang Munaqasah Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu a'laikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr.Siswanto Masruri, M.A.
NIP. 150 216 518


Drs.Rahmat Fajri, M.Ag
NIP. 150 275 041



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Masrda Adisucip Telp/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor: IN/DU/PP.00.9/1293/2005

Skripsi dengan judul: **Gerakan Mahasiswa Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia
(Studi atas Peranan HMI MPO Cabang Yogyakarta Tahun 1998-2004)**

Diajukan oleh:

1. Nama : Edy Supri Yanto
2. NIM : 00540138
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan: SA

Telah dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal: 14 Desember 2005 dengan nilai: 81(B+) dan telah dinyatakan syah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH:

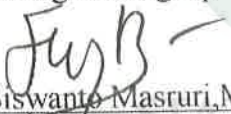
Ketua Sidang


Drs. Moh. Damami, M. Ag.
NIP.150202822

Sekretaris Sidang


Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M. Ag.
NIP:150228024

Pembimbing/merangkap Penguji


Dr. Siswanto Masruri, M. A.
NIP:150216518

Pembantu Pembimbing


Drs. Rahmat Fajri, M. Ag.
NIP:150275041

Penguji I


Drs. Singgih Basuki, M. A.
NIP:150210064

Penguji II


Nurus Sa'adah, S. Psi, M. Si, Psi
NIP:150301493



Yogyakarta, 14 Desember 2005
DEKAN


Drs. M. M. Fahmi, M. Hum
NIP: 150088748

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya dan atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Oktober 2005

Yang membuat pernyataan



Edy Supri Yanto
NIM. 00540138

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ , وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ , وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (الشورى : ٣٨) *

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya
dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat
antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan
kepada mereka.”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* DEPAG RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : DEPAG RI, 1978) hlm. 789

PERSEMBAHAN

*Kepada Allah SWT., yang selalu memberi anugerah dan kebahagiaan,
Rasulullah yang memberi contoh hidup mulia.*

Keluargaku tercinta:

*Bapak, Simbok, Istriku, adik-adik yang ganteng,
Pakdhe-Budhe, Paklik-Bulek lan Simbah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد ان محمدا
رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji-syukur hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan segala anugerah-Nya, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan umat Islam Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya yang setia pada jalan kebenaran.

Terimakasih yang tinggi penyusun sampaikan kepada:

1. Kepada Dekan Fakultas Ushuluddin beserta stafnya.
2. Ketua dan Sekretaris Prodi Sosiologi Agama.
3. Dosen Penasehat Akademik.
4. Dr. Siswanto Masruri, M.A. selaku pembimbing I dan Drs. Rahmat Fajri, M.Ag, yang telah mencurahkan waktu serta tenaga dan pikiran untuk memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian tugas akhir akademik ini.
5. Para Dosen yang telah banyak membimbing dan mengajar penulis.
6. Staff Administrasi, Cleaning Servis, Tukang Parkir Fakultas Ushuluddin yang telah banyak memberikan manfaat selama kuliah.
7. Kedua orangtua yang telah mendidik, mengasuh, merawat dan membiayai semua kebutuhan hidup penyusun dengan sabar tanpa pamrih, sehingga penulis mengerti

dan mampu menghadapi dan memahami makna kehidupan ini dan adik-adikku, serta isteriku yang manis.

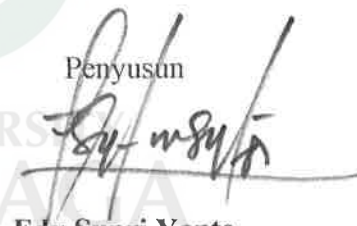
8. Terima kasih banyak penyusun hanturkan kepada kawan-kawan HMI MPO Cabang Yogyakarta, kawan-kawan Al-Mizan, komunitas VIIM RAEH, Teman-teman Seni Rupa ISI, UNY, SMSR, Sanggar NUUN yang telah mengajarku hidup “nyeni”, Abang becak terima kasih atas jasanya, teman-teman jalanan Malioboro yang mengajarku hidup sederhana, Keluarga mahasiswa Sragen Sukowati.

9. Dan semua pihak yang turut membantu kelancaran penyelesaian tugas akhir ini.

Demikian pengantar ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Semoga Tuhan selalu meridhoi langkah kita. Amin.

Yogyakarta, 10 Oktober 2005

Penyusun



Edy Supri Yanto
NIM. 00540138

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Pembahasan.....	35
BAB II MENGENAL HMI MPO CABANG YOGYAKARTA	
A. HMI dalam Lintasan Sejarah.....	36

1. Berdirinya HMI	37
2. Lahirnya HMI MPO	49
B. Khittah Perjuangan HMI MPO.....	55
1. Asas Organisasi.....	56
2. Tujuan Organisasi.....	66
3. Independensi Organisasi.....	69
C. Demokrasi dalam Pandangan HMI MPO Cabang Yogyakarta.....	78
 BAB III GERAKAN MAHASISWA DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA	
A. Gerakan Mahasiswa dalam Lintasan sejarah	79
1. Masa Kolonial.....	80
2. Masa Orde Lama.....	85
3. Masa Orde Baru.....	89
4. Masa Reformasi.....	97
B. Gerakan Mahasiswa dan Agenda Reformasi.....	107
C. Peran HMI MPO Yogyakarta Dalam Menegakkan Demokrasi Di Indonesia.....	112
1. Masa Pemerintahan Habibie.....	112
2. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid.....	117
3. Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri.....	122

D. Optimalisasi Peran HMI MPO Cabang Yogyakarta.....	124
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	138
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar-belakangi oleh suatu pandangan bahwa keberadaan gerakan mahasiswa dalam konstelasi sosial-politik di negeri ini tak bisa dipandang sebelah mata. Diakui atau tidak, keberadaan mereka menjadi salah satu kekuatan yang selalu dipertimbangkan oleh berbagai kelompok kepentingan (*interest group*) terutama pengambil kebijakan, yakni negara. Di antara elemen-elemen gerakan mahasiswa yang memiliki pengaruh signifikan adalah gerakan mahasiswa Islam. Mereka adalah organisasi massa (Ormas) mahasiswa yang memiliki basis konstituen dan massa pendukung yang besar, salah satunya adalah HMI MPO Cabang Yogyakarta, salah satu gerakan mahasiswa yang sudah mengalami proses panjang dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Islam di dalam realitas sosial khususnya Indonesia. Kelompok ini juga menjadi salah satu kelompok gerakan mahasiswa yang ikut merespon dalam proses penegakan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini hendak mengkaji mengenai konsep demokrasi menurut HMI MPO Cabang Yogyakarta, dan peranan HMI MPO Cabang Yogyakarta dalam mewujudkan tegaknya demokrasi di Indonesia, khususnya yang terjadi tahun 1998-2004.

Penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif kualitatif* ini data utamanya didapatkan dari hasil *observasi*, *interview* dan *dokumentasi*. Dengan menggunakan *pendekatan sosiologis*, maka analisis dalam penelitian ini pun menggunakan pola *analisis deskriptif*, yang diarahkan untuk mendapatkan solusi masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat tertentu berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Adapun proses yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan, lalu data diolah sesuai pendekatan sekaligus dilakukan interpretasi untuk menjelaskan arti yang terkandung dalam data. Dengan metodologi semacam ini, diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui konsep demokrasi menurut HMI MPO Cabang Yogyakarta, dan peranannya dalam menegakkan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa HMI MPO tetap beraskan Islam dengan tujuan: membentuk insan *ulul albab*, mempertahankan aqidah dan identitas Islam, dan ikut mewujudkan masyarakat yang *baldah tayyibah*. Karakteristik HMI MPO berisikan unsur-unsur ideologis, yaitu komitmen tinggi terhadap Islam, aktivitasnya mengutamakan intelektual, membatasi politik praktis dan mengutamakan perkaderan. Konsep demokrasi yang digunakan HMI MPO, yaitu suatu konsep politik yang memiliki kedaulatan rakyat terbatas, karena pada esensinya kekuasaan atau kedaulatan tertinggi hanya di tangan Allah swt. Di dalam wawasan sosial, memandang masyarakat serta pola-pola interaksi yang terjadi di dalamnya, sebagai sebuah pandangan yang sangat ideologis serta sosiologis, yang menuntut

adanya sebuah hubungan yang saling menghargai serta membebaskan. Nilai dasar yang membangun sistem sosial yang Islami tersebut berpangkal pada konsep tentang realitas tertinggi yaitu Allah swt. Dengan demikian, tauhid menjadi sumber segala bentuk masyarakat. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas ijtihad dari setiap generasi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kondisional.

Selanjutnya, sebagai gerakan mahasiswa, peranan HMI MPO Cabang Yogyakarta dalam menegakkan demokrasi di Indonesia cukup memberi nilai baik dalam kurun waktu 1998 hingga 2004 tercatat, HMI MPO Cabang Yogyakarta telah melakukan banyak hal, baik sendiri maupun afiliasi dengan kelompok lainnya, yaitu dengan merespon berbagai persoalan aktual saat itu serta melakukan pressure atas kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, diantaranya dengan menggelar aksi demonstrasi, aksi keprihatinan, aksi solidaritas, diskusi dan membuat pernyataan sikap. Apa yang dilakukan HMI MPO Cabang Yogyakarta ini merupakan bukti nyata, bahwa gerakan mahasiswa mempunyai peranan yang cukup baik dalam proses penegakan demokrasi di Indonesia. Tidak hanya itu, gerakan yang dilakukannya pun tidak semata-mata sebagai gerakan moral, lebih dari itu juga sebagai gerakan sosial dan gerakan politik, mengingat kepedulian HMI MPO Cabang Yogyakarta dalam merespon masalah-masalah sosial politik yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat. Peranan HMI MPO Cabang Yogyakarta ini menjadi begitu penting dan berarti tatkala kelompok ini berada di tengah masyarakat. Begitu artinya, sehingga sejarah perjalanan sebuah bangsa pada kebanyakan negara di dunia telah mencatat bahwa perubahan sosial (*social change*) yang terjadi hampir sebagian besar dipicu dan dipelopori oleh adanya gerakan perlawanan mahasiswa, termasuk di Indonesia, lebih khusus lagi yang terjadi di D.I. Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergerakan mahasiswa merupakan sebuah istilah yang dari masa ke masa senantiasa disertai diskursus wacana yang tajam mengenai fungsi dan peranannya. Diskursus ini menjadi urgen karena ia akan sangat berkaitan dengan jati diri dan karakter pergerakan mahasiswa itu sendiri. Perdebatan yang terjadi biasanya dalam mendefinisikan dan mendeskripsikan gerakan mahasiswa, terutama berkaitan dengan karakter gerakannya, apakah gerakan mahasiswa adalah gerakan moral, atau gerakan politik? Atau kedua-duanya?

Hariman Siregar (Mantan Ketua BEM UI 1974, tokoh peristiwa Malari) dalam bukunya *Gerakan Mahasiswa, Pilar ke-5 Demokrasi* menyebutkan bahwa gerakan mahasiswa adalah gerakan moral dan bukan gerakan politik. Kalau sampai gerakan mahasiswa melakukan gerakan politik, berarti dia telah keluar dari jati dirinya. Karena itu ia tidak bersepakat dengan gerakan mahasiswa yang bermain di tataran politik seperti menuntut mundur seorang presiden.¹

Sementara Fajroel Rachman² menegaskan bahwa gerakan mahasiswa seharusnya tidak berhenti sebagai gerakan moral dan gerakan menumbangkan

¹ Indra Kusumah, "Gerakan Politik Mahasiswa", dalam *Republika*, 15 Desember 2004, hlm. 4

² *Ibid.*

rezim saja, tetapi juga harus merebut dan membangun kekuasaan. Tanpa kekuasaan, tidaklah mungkin bagi mahasiswa untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Pandangan gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik inilah yang mendasari keterlibatan aktivis mahasiswa Indonesia sebagai anggota legislatif di DPR-MPR pada awal orde baru.

Perbedaan pandangan tentang karakter pergerakan mahasiswa ini terkadang menajam dan menyebabkan konflik di kalangan aktivis mahasiswa itu sendiri. Para penganut gerakan moral *an sich* biasanya menuduh aktivis yang melakukan gerakan politik sebagai komparador partai politik tertentu, ditunggangi kepentingan politik tertentu dan lain-lain. Sebaliknya, para aktivis yang meyakini gerakan mahasiswa bukan hanya gerakan moral, tapi juga gerakan politik biasanya menganggap orang-orang yang tidak terlibat bersama mereka sebagai apatis, apolitis, tidak *melek* politik dan lain-lain. Konflik-konflik di kalangan mahasiswa seperti ini masih sering terjadi sampai sekarang.

Terlepas dari perbedaan kedua pandangan di atas, diakui atau tidak gerakan mahasiswa telah memberikan sumbangan yang sangat besar bagi terciptanya dinamika demokratisasi di negeri ini. Hal ini dapat dilihat dari peran dan sumbangan generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa, dalam perjuangan kemerdekaan negeri ini. Dalam proses pembangunan negara dan upaya menjadi bangsa yang lebih maju, mahasiswa juga menunjukkan peranannya, baik di bidang pendidikan, politik, sosial, budaya maupun ekonomi. Sumbangan mereka telah membuktikan bahwa gerakan yang dilakukan selama ini

tidak saja sebagai gerakan moral maupun gerakan politik. Bahkan, mahasiswa dengan gerakannya tersebut juga dianggap sebagai agen perubahan sosial (*social change*). Dianggap sebagai agen perubahan sosial karena mahasiswa ingin memperjuangkan hak asasi, kesejahteraan, keamanan, dan merebut kekuasaan dengan didasari moralitas. Karena itu, gerakan mahasiswa ini tidak saja dianggap sebagai gerakan moral ataupun politik saja, tapi juga sebagai gerakan sosial. Gerakan sosial yang dimotori mahasiswa ini muncul, sebagai respon atas pemerintahan atau tindakan penguasa yang lalim, deistik, dan tidak berpihak kepada rakyat.³

Saat ini, banyak muncul gerakan-gerakan sosial yang ingin menjadi pahlawan kemanusiaan, baik gerakan itu memperjuangkan hak asasi, kesejahteraan, keamanan, dan yang lebih tragis gerakan merebut kekuasaan yang tidak didasari moralitas. Salah satu gerakan sosial yang muncul dalam realitas masyarakat, yaitu para intelektual muda yang mengusung ideologi masing-masing untuk ditransformasikan kepada sosial masyarakat. Gerakan Mahasiswa itulah yang muncul di dalam kemelut kekuasaan, kemunculannya disebabkan kegagalan tiga bentuk gerakan, yaitu gerakan pembebasan nasional, gerakan revolusi, serta gerakan reformasi. Dengan kata lain, gerakan mahasiswa lahir karena kebuntuan-kebuntuan struktural, kultural, dan konstitusional lembaga-lembaga politik, sosial,

³ A. Ubaidilah (ed.), *Pendidikan Kewargaan Demokratisasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 33

dan hukum yang ada. Sementara itu, organisasi sosial non-pemerintah yang ada terjebak pada konservatisme, tidak cukup responsif terhadap perkembangan sosial yang ada, atau bahkan terkooptasi kekuasaan. Sementara itu, mahasiswa memiliki peralatan intelektual sehingga mampu membaca kontradiksi sosial yang ada. Kesadaran kritis dan akses informasi terhadap perkembangan situasi yang cepat ini, dan kemampuannya untuk mengorganisir diri dalam organ yang fleksibel inilah yang mendorongnya melakukan pergerakan sosial.⁴

Seperti kata Huntington,⁵ bahwa gerakan mahasiswa ialah "*The Universal Opposition*" terhadap bentuk kezaliman yang selama ini dilakukan oleh insitusi negara, betapa pentingnya peran mahasiswa sebagai kekuatan oposisi di tengah masyarakat sipil, maka ketika berbicara perubahan sosial politik, secara jelas Huntington menyebut peran intelektual perkotaan sebagai kekuatan oposisi yang cenderung permanen, aktif dan sangat penting perannya.

Mahasiswa menjadi kekuatan sosial yang tidak bisa dilepaskan dalam perubahan. Proses gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa bukan semata-mata demi sebuah kekuasaan, tapi sebagai penjaga moral dan nurani dalam menjaga tegaknya demokrasi, terus menerus melakukan penguatan pada masa rakyat. Oleh karena itu, gerakan mahasiswa dalam hal ini merupakan gerakan rakyat dalam

⁴ Muhamad Mustafid dan Kholid Syeirozi, "Jawaban Paradigmatik Pergerakan terhadap Globalisasi Neoliberalisme", dalam *Trandem*, Edisi ke-V, April 2003, hlm. 4-5

⁵ Dikutip Mahmud Sidiq, *KAMMI Dalam Pergulatan Reformasi: Kiprah Politik Aktifis Dakwah Dalam Perjuangan Demokratisasi* (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 8

penguatan *civil society* baik pada level kognitif ataupun praktis. Mahasiswa dalam hal ini tidak hanya mendorong transformasi pada level kolektif namun juga pada level individual, maka disinilah gerakan mahasiswa dituntut mampu melakukan perubahan secara cermat terhadap ide-ide demokratisasi.⁶

Gerakan mahasiswa tidak lepas dari kancah politik, karena mahasiswa akan selalu berinteraksi dengan kebijaksanaan pemerintah dan kekuasaan, untuk konteks ini gerakan mahasiswa di satu sisi harus mampu merebut kepemimpinan dan memperjuangkan tuntutan-tuntutan politik dalam menghadapi rezim yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Namun disisi lain mahasiswa harus mampu melakukan pembebasan terhadap basis masa rakyat yang secara struktural mengalami ketertindasan.

Keberadaan gerakan mahasiswa dalam konstelasi sosial-politik di negeri ini tak bisa dipandang sebelah mata. Diakui atau tidak, keberadaan mereka menjadi salah satu kekuatan yang selalu dipertimbangkan oleh berbagai kelompok kepentingan (*interest group*) terutama pengambil kebijakan, yakni negara. Diantara elemen-elemen gerakan mahasiswa yang memiliki pengaruh signifikan adalah gerakan mahasiswa Islam. Mereka adalah organisasi massa (Ormas) mahasiswa yang memiliki basis konstituen dan massa pendukung yang besar seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Dipo, HMI MPO, Pergerakan

⁶ Nyarwi Ar-Rembangie, "Gerakan Mahasiswa di Negara Dunia ke Tiga pergulatan Format dan Arus Globalisasi", dalam *Trandem* III, 1 Februari 2002, hlm. 93.

Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Saat ini, terdapat lima organisasi mahasiswa ekstra universitas atau sering dinamakan ormas mahasiswa, yang cukup menonjol, yaitu HMI Dipo (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), HMI MPO (Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi) dan KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia). Kesemuanya menarik untuk dikaji karena sama-sama membawa label Islam sebagai identitas organisasinya, namun memiliki corak wacana dan strategi perjuangan yang khas.

Berangkat dari persoalan di atas penyusun ingin mengadakan penelitian yang secara khusus diproyeksikan *Mengkaji Gerakan Mahasiswa dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia, Studi terhadap HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) Cabang Yogyakarta dari tahun 1998-2004*. Dengan alasan sebagai berikut :

Pertama, lahirnya HMI MPO merupakan salah satu respon dari golongan terpelajar Islam terhadap politik sebagai manifestasi dinamika pemikiran dan juga sebagai bentuk tanggung jawab mereka dalam membangun negara. Kebijakan pemerintah memberlakukan asas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya dasar ormas mendapat tantangan yang cukup beragam dari kalangan umat Islam. Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) sebagai organisasi pecahan/faksi dari HMI, terlahir akibat konflik berkepanjangan

dalam menyikapi penerimaan asas tunggal tersebut. Karena dianggap menghambat proses berkembangnya demokrasi di negeri ini.⁷

Kedua, HMI MPO adalah salah satu gerakan mahasiswa yang sudah mengalami proses panjang dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Islam di dalam realitas sosial khususnya Indonesia. Sebagai gerakan Islam, HMI MPO telah mengidentifikasikan diri sebagai pembinaan kader-kader menjadi *insan ulil albab* serta perjuangan ke arah terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Gerakan ini juga memperjuangkan suatu tatanan sosial yang diletakkan di atas landasan *dien* (ideologi) Islam, yaitu sistem universal, bukan simbolisme kaum tertentu.⁸

Ketiga, HMI MPO adalah salah satu kelompok gerakan mahasiswa yang ikut merespon dalam proses penegakan demokrasi di Indonesia. Munculnya gerakan Mahasiswa 1998, yang diawali dari krisis moneter menjadi krisis ekonomi dan berlanjut pada krisis kepercayaan terhadap pemerintah, diawali munculnya penerapan “lima paket Undang-undang politik” yang dianggap melemahkan masyarakat untuk melakukan kontrol, yang disusul protes mahasiswa pada 21 Mei 1998, sehingga Soeharto lengser dari kekuasaan (yang dianggap sebagai tanda peralihan dari orde baru ke orde reformasi), HMI MPO terlibat aktif dalam gerakan tersebut. Begitu juga dalam pendudukan DPR/MPR

⁷ Rusli Karim, *HMI MPO dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Mizan, 1997), hlm. 135.

⁸ Syafinuddin Al-Mandari, *HMI dan Wacana Revolusi Sosial*, (Jakarta: Hijau Hitam, 2003), hlm. 18.

sebelum meledaknya gerakan reformasi 1998 dan munculnya “revolusi sistemik” yang digagasnya sebagai solusi perbaikan sistem.⁹

Keempat, penyusun memilih HMI MPO Cabang Yogyakarta sebagai objek penelitian karena HMI MPO Cabang Yogyakarta tetap *istiqamah* di garis gerakan Islam, walaupun pada awal berdirinya harus menghadapi polemik intern dan ekstern organisasi. Di samping itu, penyusun juga ingin mengambil salah satu contoh perilaku-perilaku praktis gerakan mahasiswa lokal dalam proses penegakan demokrasi di Indonesia, dan Yogyakarta dipilih karena kota ini merupakan merupakan kota pendidikan, maka organisasi gerakan mahasiswa tumbuh pesat serta varian ideologinya yang beranekaragam, sehingga banyak sekali isu-isu gerakan serta wacana pemikiran muncul, yang menjadi isu gerakan dalam merespon situasi sosial-politik nasional.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penyusun tertarik untuk mengangkat dan menjadikan HMI MPO Cabang Yogyakarta sebagai obyek penelitian, sekaligus penyusun juga ingin mengetahui bagaimana konsep demokrasi menurut organisasi ini dan peranannya dalam proses menegakkan demokrasi di Indonesia, khususnya yang terjadi dari tahun 1998 sampai 2004.

⁹ *Ibid.*, hlm. 93

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini hanya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa konsep demokrasi menurut HMI MPO Cabang Yogyakarta ?
2. Bagaimana peranan HMI MPO Cabang Yogyakarta dalam mewujudkan tegaknya demokrasi di Indonesia, khususnya yang terjadi tahun 1998-2004 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui konsep demokrasi menurut HMI MPO Cabang Yogyakarta.
2. Mengetahui peran HMI MPO Cabang Yogyakarta dalam mewujudkan tegaknya demokrasi di Indonesia, khususnya yang terjadi tahun 1998-2004.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain:

1. Menambah khazanah keilmuan tentang konsep demokrasi dan perkembangan demokrasi di Indonesia.
2. Sebagai bahan bacaan bagi pelaku dan pemerhati demokrasi, serta orang-orang yang berkecimpung di dalamnya.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga-lembaga penelitian umumnya dan bagi lembaga-lembaga yang concern dan peduli dengan demokrasi pada khususnya.

E. Kajian Pustaka

Gerakan mahasiswa Islam kritis dan progresif yang dikembangkan oleh HMI MPO telah merangsang minat yang tinggi dikalangan intelektual dan peneliti, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk melakukan kajian dan analisis yang dalam terhadap substansi, dari beberapa karakteristik gerakan yang dilakukannya. Beberapa buku, skripsi, disertasi, kertas kerja, makalah, kolom atau tulisan-tulisan lepas telah dibuat untuk keperluan ini.

Pencarian pustaka yang dilakukan meliputi penelusuran buku-buku atau referensi lainnya yang dapat membantu dalam proses penelitian, untuk itu penyusun akan memaparkan satu persatu dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, khususnya penelusuran pustaka yang berhubungan dengan tema penelitian yang peneliti lakukan ini.

Penulisan sejarah HMI pernah dilakukan antara lain oleh Agussalim Sitompul, A. Dahlan Ranuwihardjo, Sulastomo, Victor Tanja dan Ridwan Saidi. Agussalim Sitompul (1976 dan 1986) menulis dua buku yang agak terfokus memuat sejarah HMI. Pertama buku *Sejarah HMI (Tahun 1947-1975)*. Buku ini merupakan hasil seminar sejarah HMI yang berlangsung di Malang tahun 1975. Pada dasarnya buku ini memuat secara kronologis perjalanan HMI sejak tahun 1947 hingga tahun 1975. Secara keseluruhan catatan-catatan di dalamnya cukup membantu dalam menilik sejarah perkembangan HMI.

Kedua, buku *Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*. Sebenarnya buku ini serupa dengan yang pertama, dan merupakan pengulangan dari bukunya yang pertama, hanya saja ditambah dengan pidato-pidato *dies ride* Ketua Umum PB HMI memperingati *dies natalis* HMI yang dilakukan setiap tahun. Buku ini juga memuat makalah A. Dahlan Ranuwihardjo tentang sejarah HMI yang dibawakannya pada seminar sejarah HMI di Malang yang telah disebut di atas.

Sulastomo (1989) menulis buku *Hari-Hari yang Panjang 1963-1966*, yang menceritakan kesaksiannya terhadap proses peralihan kekuasaan di Indonesia yang melahirkan Orde Baru dan posisi HMI dalam suasana perubahan politik ketika itu. Sulastomo adalah Ketua Umum PB HMI 1963-1966, yang tentunya memahami benar dinamika di sekitarnya dalam menentukan kebijakan HMI pada masa itu. Buku ini sangat membantu memberi gambaran pemahaman pengambilan sikap yang cenderung akomodasionis yang dilakukan HMI.

Ridwan Saidi (1985), menulis buku *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*. Sebagai kumpulan tulisan yang semula dimuat sebagai artikel di berbagai media massa, tentulah sulit diharapkan kajian yang utuh dan mendalam darinya. Bagi penulisan buku ini, karya Ridwan Saidi tersebut cukup penting untuk memahami nuansa sekitar tahun 1970-an yang melatarbelakangi pengambilan sikap HMI.

Adapun buku-buku yang mengaji gerakan HMI MPO antara lain; buku karya M. Rusli Karim yang berjudul *HMI MPO dalam Kemelut Modernisasi Politik Indonesia*. Buku ini mengkaji secara panjang lebar tentang HMI MPO yang berhubungan arus modernisasi politik di Indonesia, tapi dalam buku ini hanya memfokuskan pada kajian HMI MPO baik pada sebab lahirnya, maupun salah satu akibat kebijaksanaan modernisasi politik, atau secara lebih khusus pembangunan politik yang dilaksanakan pemerintahan orde baru.

Buku lainnya *HMI dan Wacana Revolusi Sosial* yang ditulis oleh Syaifuddin Al-Mandari. Buku ini mengkaji wacana revolusi sosial pada orde baru bagaimana merespon kebijaksanaan pemerintah dan pembaharuan pada sistem-sistem sosial yang kurang bisa memberi kontribusi kebutuhan rakyat. Dari ulasannya dapat diketahui keinginan para aktivis HMI untuk memberikan sumbangan wacana pada pemerintah dalam proses perbaikan sistem sosial.

Terakhir, buku yang berjudul *HMI Rekayasa Asas Tunggal Pancasila* disusun oleh Hasanuddin M. Saleh. Buku ini mengkaji munculnya Majelis Penyelamat organisasi (MPO) HMI yang merupakan “tandingan” dari organ “resmi” HMI hasil Mukhtar Padang, di dalam buku ini diulas pertentangan secara ideologis dan intelektual dari kedua belah pihak kenapa terjadi perseteruan internal di kalangan HMI.

Sementara itu karya-karya dalam bentuk skripsi antara lain; Skripsi Muhammad Mansur, yang berjudul *HMI, Azas dan Sifat Perjuangan* (1970). Dan Skripsi Alek Syaukani Bustami, yang berjudul *Organisasi, suatu studi tentang*

HMI Cabang Yogyakarta. Kedua skripsi ini lebih banyak memfokuskan diri pada ideologi organisasi, khususnya mengenai asas dan sifat perjuangan HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam.

Dari pemaparan kepustakaan yang dapat penyusun peroleh di atas, maka jelas bahwa penelitian yang penyusun lakukan ini belum pernah dilakukan oleh penyusun sebelumnya. Karena dalam penelitian ini, penyusun akan memaparkan lintasan sejarah HMI dengan menggunakan periodisasi sesuai dengan perkembangan kekuasaan/pemerintahan di negeri ini, yaitu mulai masa pemerintahan Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri (antara tahun 1998-2003). Pembagian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran latar belakang yang jelas mengenai situasi sosial politik dalam perilaku HMI.

F. Kerangka Teoritik

Untuk melihat peranan gerakan mahasiswa HMI MPO sebagai salah satu element gerakan mahasiswa yang ikut serta dalam menguatkan tegaknya demokrasi di Indonesia, penulis menggunakan beberapa pisau analisa atau kerangka teoritis. Pisau analisa tersebut antara lain:

Gerakan mahasiswa dan Sosial

Gerakan bisa diartikan sebagai tindakan atau reaksi atas sesuatu yang terjadi. Gerakan yang dimaksud di sini gerakan yang berhubungan dengan keadaan realitas sosial. Dalam pandangan Mansour Fakih Untuk memahami gerakan sosial, maka satu entitas yang tidak bisa dipisahkan dari kajian ini

adalah teori perubahan. Khusus yang terjadi di negara dunia ketiga, gerakan sosial di dunia ketiga biasanya secara tidak langsung dihubungkan dengan *maintream approach* (model perubahan dominan) yang direkayasa oleh negara, melalui apa yang disebut dengan *developmentalisme* (pembangunan).¹⁰ Dengan kata lain, dalam interaksi sosial para aktor terlibat dalam proses saling mempengaruhi; maka dapat di katakan bahwa sesuatu gerakan tidak lain dari proses penyusunan kekuatan dari pihak-pihak yang menghendaki perubahan, dan secara bertahap menggelar tindakan-tindakan nyata, sedemikian rupa sehingga perubahan bergulir.¹⁰

Melihat hakekat manusia sebagai makhluk sosial, dalam proses berinteraksi manusia menurut pandangan Blumer mempunyai lima kapasitas yang penting itu antara lain; kapasitas berpikir, kapasitas berpikir dan berinteraksi, kapasitas mempelajari makna dan simbol, kapasitas aksi dan interaksi dan membuat pilihan dan kapasitas membuat pilihan.¹¹ Dari kapasitas yang diungkapkan oleh Blumer mengandung arti penting terhadap gerakan sosial, sebab pada hakekatnya manusia mempunyai kemampuan

¹⁰ Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial; Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 41.

¹⁰ Timur Mahardika, *Gerakan Massa Mengupayakan Demokrasi dan keadilan secara Damai*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001), hlm. 12.

¹¹ George Ritzer dan Douglas J. Godman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 289-294.

untuk membangun perubahan sosial yang bisa saling memberi manfaat dalam proses bermasyarakat.

Dalam konteks analisis gerakan sosial, satu hal yang tidak bisa dilepaskan adalah teori pengerahan atau mobilisasi sumber daya (*resources mobilization*). George Simmel melihat isi (*content*) adalah faktor yang mempengaruhi setiap bentuk (*form*) sosial. Simmel beranggapan faktor utama dari setiap kelompok sosial adalah jumlah, semakin banyak jumlah yang terlibat maka semakin besar potensi yang dimiliki satu kelompok sosial¹².

Berbeda lagi dengan Antonio Gramsci, untuk meneguhkan kekuasaan, negara bekerja melalui hegemoni, yaitu kekuasaan yang pembentukannya didasarkan kepada pembinaan konsensus melalui kepemimpinan budaya. Potensi mobilisasi gerakan sosial dinilai sangat ditentukan intelektual hegemonik dan counter-hegemonik yang dilakukan melawan kekuasaan negara¹³.

Selanjutnya, dalam gerakan terdapat dua tipe (*karakter*) umum, yakni:

1. Gerakan sebagai suatu reaksi spontan; sebab-sebab yang tidak begitu jelas (atau tidak mempunyai rumusan yang jelas) menggunakan jaringan

¹² Doyle Paul Jhonson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I* (terj. M.Z. Lawang). (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 274.

¹³ Zainuddin Maliki, *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik*, (Surabaya: LPAM, 2003), hlm: 186-189.

informasi yang tidak tertata (bukan dikonstruksi secara sengaja) terhadap suatu keadaan tertentu.

2. Gerakan sebagai langkah-langkah terorganisir dengan tiruan, strategi dan cara-cara yang dirumuskan secara jelas sadar dan didasarkan kepada suatu analisa sosial yang kuat.¹⁴

Salah gerakan sosial yang banyak memberi arti dalam proses perubahan dalam pembangunan sebuah bangsa dari masa lalu sampai sekarang, yang tidak mempunyai kepentingan kekuasaan dan banyak orang mengatakan sebagai kekuatan moral sebuah bangsa kelompok gerakan ini adalah gerakan mahasiswa. Karena sebagai kelompok kelas menengah, kehadirannya di kalangan warga masyarakat yang berkecimpung dengan ilmu pengetahuan dan dilingkungan orang yang menerapkan ilmu sebagai alat kepentingan. Ada yang menilai bahwa mereka yang belajar dan menempuh latihan yang diberikan oleh kaum intelektual dan intelektual teknokrat, untuk menempati posisi mereka di kemudian hari, sebagian yang lain menyatakan mahasiswa adalah mereka yang dilatih untuk bukan saja menempati posisi tapi juga melakukan perubahan.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 16

¹⁵ Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan Gerakan Mahasiswa Antara Moral dan Politik*, (Yogyakarta: INSIST Press, 1999), hlm. 9.

Berdasarkan hal inilah Mahasiswa dikelompokkan sebagai kekuatan moral (*moral force*), karena *pertama*, mahasiswa mengalami pendidikan dan sosialisasi politik sehingga mengetahui, memahami, dan meresapi persoalan-persoalan masyarakat. *Kedua*, mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang terdidik yang penuh jiwa idealisme dan berhati nurani, ia dalam menilai keadaan empiris dengan berpolakan nilai-nilai idealita, banyak kasus sering kali tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, hal ini menyentuh nilai idealisme mahasiswa mempunyai nyali dan keberanian luar biasa dalam melakukan perubahan-perubahan sosial menurut idealisme yang dia pahami.¹⁶

Dikotomi gerakan mahasiswa antara gerakan moral dan gerakan politik Ridaya La Ode Ngokowe tidak sepakat dengan keberadaan seperti itu menurutnya gerakan mahasiswa adalah gerakan politik yang menjunjung tinggi moralitas. Dengan alasan; *Pertama*, berangkat dari tesis bahwa manusia sebagai makhluk *zoon politicom*, maka aktivitas mahasiswa termasuk aktivitas politik. *Kedua*, dikotomi itu tendensius agar mahasiswa tidak mengarap isu-isu politik, juga hegemonik. *Ketiga*, berpijak pada

¹⁶ A. M. Fatwa, "Mahasiswa Reformasi dan Masa Depan Demokrasi," dalam *Republika*, 1 Februari 2002, hlm. 2.

dikotomi diatas selain sulit dilakukan secara konsisten juga sangat tidak efektif dalam kontek perubahan.¹⁷

Sebagai cendikiawan muda, maka mahasiswa sebagaimana yang dikemukakan oleh Lewis Coher adalah: "Orang-orang yang kelihatanya tidak puas menerima kenyataan sebagaimana adanya, mereka mempertanyakan kebenaran yang berlaku pada saat, dalam hubungan dengan kebenaran yang lebih tinggi dan luas".¹⁸

Sebagai kaum intelektual dan intelektual teknokrat, mahasiswa berpeluang dalam posisi terdepan dalam proses perubahan sosial. Mahasiswa kini dan sampai kapanpun akan diterima masyarakat sebagai warga kelompok pembaharu kehidupan masyarakat. Itu sebabnya gerakan mahasiswa dipandang sebagai gerakan moral.

Mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat atau bangsa, yang antara lain: *pertama*, sebagai kekuatan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan *kedua* yaitu sebagai penerus kesadaran masyarakat luas akan problem yang ada dan menumbuhkan kesadaran itu untuk menerima alternatif,

¹⁷ Alfian Hamzah (ed), *Suara Mahasiswa, Suara rakyat*, (Bandung: Remaja Rosda Kariya, 1998), hlm. 7

¹⁸ Dikutip Alfia Darmawan, "Politik Kaum Muda Dalam Perubahan". Dalam *Jurnal Ilmu Politik* edisi Mei 2003, hlm. 13.

perubahan yang dikemukakan atau didukung mahasiswa itu sendiri, sehingga masyarakat berubah ke arah kemajuan.¹⁹

Adapun bentuk-bentuk gerakan mahasiswa, antara lain aksi demonstrasi, aksi mogok makan, perorganisasian kaum petani serta advokasi-advokasi terhadap masyarakat. Demonstrasi dilakukan sebagai upaya untuk menunjukkan sikap mahasiswa terhadap suatu hal atau suatu peristiwa protes yang dilakukan untuk menentang segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan tujuan membangun masyarakat yang adil, jujur dan sejahtera. Secara sosiopolitik, "protes" merupakan ungkapan ketegangan antara kompleksitas dan fragmentasi hubungan manusia dalam lembaga sosial, serta kesenjangan dalam tatanan sosio budaya²⁰. Gerakan aksi protes mahasiswa dilakukan oleh aktivis itu, sebagai simbol oposisi, karena tidak ada kesesuaian antara kenyataan sosial dengan premis- premis tatanan sosial yang ideal dan kebudayaan modern.²¹ Aksi protes ini biasanya menjadi ciri utama (*trade mark*) dari gerakan mahasiswa, demonstrasi mahasiswa menjadi alat yang ampuh untuk menunjukkan sikap kritis, dengan maksud suara mereka akan diketahui oleh para pemegang kebijakan. Dengan sasaran para pengambil kebijakan tersebut, kebijakan

¹⁹ Arbi Sanit, *Op.cit.*, hlm. 10.

²⁰ Amin Rais (dkk), *Mendayung Diantra HAM dan Demokrasi*, Senat Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Solo, 1995, hlm.95

²¹ *Ibid.* hlm.98

dapat ditinjau ulang serta dirubah ketetapanannya, sesuai dengan aspirasi yang disuarakan oleh gerakan demonstrasi mahasiswa tersebut²²

Bila dilihat dari peroses sejarahnya gerakan mahasiswa bisa dibedakan menjadi dua bagian. *Pertama*, kecaman-kecaman terhadap masalah-masalah politik secara umum, fase ini merupakan kristalisasi dari gejala kehidupan politik mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh situasi yang memperhatikan kehidupan umum serta mahasiswa itu sendiri, ketidakadilan sosial, ketidakpuasan terhadap penguasa. *Kedua*, pendirian serta pengembangan gerakan secara eksplisit dengan landasan ideologis. Setelah mengalami kejenuhan bergelut dalam kehidupan kampus, mahasiswa mulai bergelut di jalan.²³

Jadi gerakan mahasiswa dapat disimpulkan sebagai elemen oposisi yang terus bergerak dinamis dalam merespon setiap peristiwa politik, dan biasanya diiringi oleh mobilisasi massa yang massif dalam bentuk aksi unjuk rasa. Oposisi merupakan wujud atau respon atas berbagai realitas sosial ataupun kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak berpihak.

Menurut Ted Robert Gurr dalam teorinya *Relative deprivation* (Deprivasi relatif), gerakan mahasiswa yang dilakukan semacam ini terjadi

²² Farizal, "Pola Gerakan Mahasiswa Pasca Orde Baru: Studi Deskriptif KAMMI dan BEM dalam mengawal Agenda Reformasi Pada Masa Pemerintahan Abdurahman Wahid".. *SKRIPSI* Jurusan Ilmu Pemerintahan, UMY. 2004

²³ "Bila Mahasiswa "Bersidang Dijalan" dalam Majalah *Tarbawi*, Edisi 37, tanggal 20 Juni 2002.

karena adanya diskontinuitas dari sistem sosial yang disebabkan oleh perubahan yang sangat cepat dan meluas mengenai individu-individu dan masyarakat. Menurut Gurr, deprivasi relatif adalah perasaan tidak sesuai antara ekspektasi nilai dengan kapabilitas nilai pada individu atau kelompok masyarakat, ekspektasi nilai adalah kondisi atau hal-hal yang mampu atau mereka pikir mampu-diraih dipertahankan. Perasaan teringkari dan tersingkirkan dalam bidang kehidupan tertentu akan mudah mengenai individu dan kelompok masyarakat sebagai akibat perubahan sosial yang cepat. Gurr memandang bahwa deprivasi relatif adalah variabel independen dengan indeks ukuran menyeluruh dari diskriminasi ekonomi dan politik, potensi separatisme, perpecahan kelompok agama, kondisi ekonomi yang buruk dan timpang, pembatasan partisipasi politik dan kebijaksanaan pemerintah yang tidak adil.²⁴

Teori konflik merupakan salah satu yang dapat digunakan untuk melihat terjadinya gerakan mahasiswa ini. Menurut Dahrendorf menggambarkan bahwa dalam setiap asosiasi yang mempunyai struktur selalu terdapat dua kelas, yaitu kelas yang mempunyai kekuasaan otoritatif (dominasi) dan kelas yang tidak mempunyai kekuasaan otoritatif subyektif

²⁴ Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*, (New Jersey: Princeton University Press, 1970) hlm. 24

(subyeksi).²⁵ Konflik akan muncul apabila terdapat perbedaan distribusi nilai-nilai dan benda-benda yang terbatas, seperti pendapatan, status, kekuasaan, serta adanya dominasi teritorial.²⁶ Nilai yang dimaksud di sini lebih bermakna ideologis, yaitu berkaitan dengan cita-cita atau idealisme yang hendak diwujudkan. Ada dua fungsi yang dimiliki ideologi dalam kaitannya dengan konflik. Di satu pihak, ideologi untuk menyatukan komunitas dengan mendorong anggotanya untuk menerima kekuasaan yang memerintahnya. Di pihak lain, ideologi bisa membagi suatu komunitas yang menyebabkan terjadinya konflik jika ideologi berada bersama, yang masing-masing bergantung pada dukungan anggota komunitas.²⁷

Mengenal Demokrasi

Maraknya wacana demokrasi dan demonstrasi ini menjadikan kecenderungan dan minat bagi hampir semua rezim negara-negara berkembang, untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap tuntutan yang berkembang dan melakukan reformasi politik. Walaupun dalam kenyataannya dari beberapa rezim itu mengedepankan keamanan, namun

²⁵ Ralf Dahrendorf, *Konflik dan konflik dalam Masyarakat Industri*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 210-211.

²⁶ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M.Z. Lawang (Jakarta Gramedia, 1986), hlm. 199

²⁷ Maurice Duveger, *Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Pustaka, 1993), hlm. 267

tetap menggunakan demokrasi sebagai retorika politik untuk alat legitimasi. Beberapa rezim otoritarian negara berkembang tetap mengklaim pemerintahannya sebagai penganut sistem demokrasi atau sekurang-kurangnya, dalam proses ke dalam itu.²⁸

Affan Gaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (*demokrasi normatif*) dan empirik (*demokrasi empirik*). Demokrasi normatif adalah yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik etis.²⁹

Sementara itu, Robert Dahl menganggap bahwa sikap tanggap pemerintahan secara terus menerus terhadap prefensi atau keinginan warga negaranya merupakan ciri khas demokrasi. Untuk menjamin hal ini maka rakyat harus diberi kesempatan untuk merumuskan prefensi itu kepada sesama warga negara dan pemerintah baik melalui tindakan individual maupun kolektif dan mengusahakan agar kepentingannya itu dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan

²⁸ Syamsudin Haris, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm.3

²⁹ Dikutip Dede Royada (dkk.), *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 10-11.

pemerintah, artinya tidak diskriminasikan berdasarkan isi atau asal usulnya³⁰.

Menurut Nurcholish, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis, karena demokrasi harus diupayakan. Demokrasi dalam kerangka diatas berarti sebuah proses melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Menurut Nurcholish pandangan hidup demokratis harus berdasarkan tujuh norma yang berkembang yaitu:

- a. Pentingnya kesadaran akan pluralisme
- b. Terciptanya kesadaran akan musyawarah
- c. Terciptanya moral (keluhuran akhlak) dengan baik
- d. Terciptanya permufakatan yang jujur dan sehat
- e. Terpenuhinya kebutuhan pokok (sandang, papan, pangan)
- f. Kerja sama antara warga masyarakat dan sikap mempercayai itikad baik.
- g. Terciptanya pendidikan demokrasi bagi masyarakat.³¹

Makna demokrasi bisa dipahami sebagai suatu sistem yang menjadi dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah mengenai

³⁰ Robert Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven: Yale, 1973), hlm. 2-3.

³¹ Dede Rosyada (dkk.), *Op.cit.*, hlm. 113-11.

kehidupannya, termasuk pada kebijaksanaan negara. Dengan demikian negara yang berdasarkan demokrasi berarti negara tersebut terwujud karena kehendak rakyat. Secara organisatoris kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara terletak di tangan rakyat.

Dari beberapa pendapat di atas diperoleh kesimpulan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem masyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintah. Kekuasaan di tangan rakyat mengandung tiga hal: *pertama*, pemerintahan dari rakyat (*government of the people*); *kedua*, pemerintahan oleh rakyat (*government by people*); *ketiga*, pemerintahan untuk rakyat (*government for people*). Jadi hakikat suatu pemerintahan yang demokratis bila ketiga hal di atas dapat dijalankan dan ditegakkan dalam tata pemerintahan.³²

Berdasarkan norma-norma di ataslah demokrasi dapat ditegakkan. Dan tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat bergantung pada tegaknya unsur-unsur penopang demokrasi, di antaranya; *Pertama*, Negara hukum, yaitu mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan jaminan hak asasi manusia. *Kedua*, masyarakat madani (*civil society*), yaitu dicirikan

³² *Ibid.*

dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat yang egaliter. Menurut Gellner, Masyarakat madani (*civil society*) bukan hanya syarat penting atau pra-kondisi bagi demokrasi semata, tetapi tatanan nilai dalam masyarakat madani (*civil society*) seperti kebebasan dan kemandirian juga suatu yang inheren baik secara internal (dalam hubungan horisontal yaitu hubungan antar warga negara) maupun secara eksternal (dalam hubungan vertikal yaitu hubungan negara dan pemerintah dengan masyarakat dan sebaliknya). Ketiga, infrastruktur politik, yang terdiri dari partai politik (*political party*), kelompok gerakan (*Movement group*) dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan (*pressure/interest group*). Keempat, pers yang bebas dan bertanggung jawab.³³ Dari ketiga unsur di atas penyusun lebih memfokuskan pada nomer yang kedua, yaitu menciptakan masyarakat madani (*civil Society*) Oleh karena itu, gerakan mahasiswa dalam hal ini merupakan gerakan rakyat dalam penguatan *civil society* baik pada level kognitif ataupun praktis. Mahasiswa dalam hal ini tidak hanya mendorong transformasi pada level kolektif namun juga pada level individual, maka

³³ *Ibid.*, hlm. 177-120.

analisis. Analisisnya dikerjakan berdasarkan data *expast freto*, yang artinya data-data dikumpulkan setelah semua kejadian telah berlangsung.³⁵

Penelitian deskriptif kualitatif dipergunakan karena penyusun ingin menggambarkan secara tepat sifat-sifat dari keadaan, gejala atau perkembangan gejala dalam hubungan antara obyek penelitian dengan gejala masyarakat, khususnya yang terjadi dan ada pada masa sekarang, yaitu suatu realitas sosial mengenai gerakan HMI MPO dalam ikut serta menegakkan demokrasi di Indonesia.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **pendekatan sosiologis**. Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengkaji peran HMI MPO Cabang Yogyakarta dan upayanya dalam menumbuhkan demokrasi di Indonesia, melalui berbagai aktifitas yang dilakukannya yang dianggap mampu memberikan perubahan-perubahan (khususnya perubahan sosial) bagi dinamika dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Gambaran realitas sosial mengenai gerakan dan peranan HMI MPO Cabang Yogyakarta dalam upaya mewujudkan tegaknya demokrasi di Indonesia ini berlangsung dari tahun 1998 sampai 2004. Indikator-indikator yang akan dilihat dalam upaya mewujudkan demokrasi di Indonesia adalah perilaku praktis kelompok dalam merespon kebijakan-kebijakan pemerintah dan penyelenggaraan pemerintahan tahun 1998-2004.

³⁵ Muh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 131

disinilah gerakan mahasiswa dituntut mampu melakukan perubahan secara cermat terhadap ide-ide demokratisasi.³⁴

G. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), karena penyusun bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam mengenai konsep demokrasi menurut HMI MPO Cabang Yogyakarta, sekaligus mengetahui sejauhmana peranannya dalam menegakkan demokrasi di Indonesia, khususnya yang terjadi tahun 1998-2004. Dengan *field research* ini, penyusun akan menuturkan keadaan objektif atau permasalahan yang ada dan terjadi sekarang, berdasarkan data-data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data yang telah ditentukan, yaitu; observasi, interview dan dokumentasi.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian **deskriptif kualitatif**. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk studi yang bertujuan untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara akurat sifat-sifat dari fenomena, kelompok maupun individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan, meminimalisasikan bias serta memaksimumkan reabilitas

³⁴Nyarwi Ar-Rembangie, "Gerakan Mahasiswa di Negara Dunia ke Tiga pergulatan Format dan Arus Globalisasi", *Trandem* III, 1 Pebruari 2002, hlm.93.

d. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh dari sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data mengenai variabel.³⁶ Sumber data primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah informasi yang disampaikan oleh saksi mata, misalnya catatan rapat, daftar anggota organisasi atau arsip-arsip laporan baik melalui wawancara atau dokumentasi.
2. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data mengenai variabel.³⁷ Sumber data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah semua pustaka yang dapat dijadikan sumber data, khususnya materi-materi yang terkait dengan masalah yang diteliti.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Nazir didefinisikan sebagai prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan,³⁸ maka dari itu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara:

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode berikut:

³⁶ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 132.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 105.

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang hasil pengamatan tersebut dicatat secara sistematis.³⁹ Menurut Black dan Champion, observasi ini dilakukan; *pertama*, untuk mengamati fenomena sosial-keagamaan sebagai peristiwa aktual yang memungkinkan peneliti memandang fenomena tersebut sebagai proses; *kedua*, untuk menyajikan kembali gambaran dari fenomena sosial keagamaan dalam pelaporan penelitian dan penyajian; *ketiga*, untuk melakukan eksplorasi atas *setting* sosial dimana fenomena itu terjadi.⁴⁰ Dalam pandangan Black dan Champion, observasi dibedakan menjadi dua observasi partisipan dan observasi non partisipan. Dari hal di atas penyusun cenderung menggunakan metode observasi non partisipan, di sini penyusun hanya memerankan diri sebagai pengamat bukan berperan ganda, sebagai pengamat dan sekaligus menjadi bagian yang diamati.

Metode ini penyusun gunakan untuk mengetahui gambaran umum mengenai gerakan mahasiswa, khususnya yang dilakukan HMI MPO Cabang Yogyakarta dalam upaya menegakkan demokrasi di Indonesia.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 234

⁴⁰ Dikutip Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 167

Dengan cara observasi ini, penyusun melakukan pengamatan dan mencatat data-datanya secara sistematis.

2. Metode Interview

Metode interview adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (orang yang diwawancarai), atau dengan kata lain, pengumpulan data berupa tanya-jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan.⁴¹

Metode ini penyusun gunakan untuk mengetahui secara langsung berbagai pandangan, opini dari beberapa anggota HMI MPO, yang menyaksikan kejadian dari 1998 sampai 2004, khususnya mengenai informasi yang berkaitan dengan gerakan mahasiswa dalam upaya menegakkan demokrasi di Indonesia. Dengan metode ini penyusun mengajukan pertanyaan kepada beberapa narasumber yang telah ditentukan, yaitu pengurus atau anggota HMI MPO Cabang Yogyakarta sesuai dengan periode masing-masing.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1983), hlm 128

transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya.⁴² Atau pengumpulan data melalui data-data tertulis.⁴³

Dalam mengoperasionalkan teknik ini, penyusun menggunakan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Adapun bahan-bahan tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber dokumen seperti buku, media masa, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan organisasi, surat keputusan maupun surat pernyataan yang ditulis oleh anggota organisasi. Semua data yang dikumpulkan tersebut adalah data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.⁴⁴

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **analisis deskriptif**. Metode ini disebut sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat

⁴² Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 236

⁴³ Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*, hlm 136

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 191.

tertentu berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya.⁴⁵

Sebagaimana yang diungkapkan Winarno Surachmad, bahwa dalam setiap penelitian deskriptif maka data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis,⁴⁶ maka, dalam penelitian ini peneliti menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Agar hasil penelitian mempunyai bobot yang tinggi, maka dilakukan identifikasi sesuai dengan dimensi-dimensi yang cukup berpengaruh dan relevan untuk diperhatikan. Dari fakta-fakta yang ditemukan, lalu dilakukan penafsiran, analisis dan interpretasi. Karena itu, penelitian ini sangat mementingkan untuk memperoleh kebenaran data.

Adapun proses yang dilakukan adalah sebagai berikut; Berawal dari pengumpulan data yang dibutuhkan, yang diperoleh melalui hasil observasi, interview dan dokumentasi, lalu data diolah sesuai dengan pendekatan yang dipilih, kemudian dilakukan penyusunan data dengan memilih dan menggolongkan data dalam kategori-kategori tertentu. Setelah data tersusun, dilakukan interpretasi untuk menjelaskan arti yang terkandung dalam data. Interpretasi sebagai langkah untuk mendapatkan kebenaran hakekatnya lebih didasarkan pada pengetahuan atau subyektifitas penyusun.

⁴⁵ Robert Bogdan, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu Sosial*. (Surabaya: Usaha Nasional), 1992), hlm 20

⁴⁶ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: CV. Tarsito, 1970), hlm. 132.

H. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama adalah Pendahuluan. Bab ini terdiri dari; *pertama*, Latar Belakang Masalah, yang menjelaskan alasan dipilihnya tema dan obyek penelitian ini HMI MPO Cabang Yogyakarta. *Kedua*, Rumusan Masalah, yang merupakan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yang perlu dijawab oleh hasil penelitian. *Ketiga*, Tujuan Penelitian, *Keempat*, Kegunaan penelitian *Kelima*, Tinjauan Pustaka, yang akan menunjukkan beberapa bukti referensi bahwa penelitian ini belum dilakukan peneliti sebelumnya. *Keenam*, Kerangka Teoritik, yang memaparkan bangunan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian, dari teori mengenai gerakan mahasiswa dan teori demokrasi. *Ketujuh*, Metodologi Penelitian, yang memuat tentang perangkat kerja penelitian, diantaranya berisi Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data. *Kedelapan*, Sistematika Pembahasan, yang berisi tentang uraian-uraian persoalan penelitian baik dari pendahuluan sampai penutup.

Bab Kedua merupakan Gambaran Umum HMI MPO Cabang Yogyakarta. Ada tiga hal yang akan diulas dalam bab ini; *Pertama*, Sejarah lahirnya HMI sampai munculnya HMI MPO, *Kedua*, Khittah Perjuangan HMI MPO sebagai Gerakan Sosial yang terangkum dalam: Asas Organisasi, Tujuan Organisasi, Independensi Organisasi. *Ketiga*, HMI MPO dan Demokrasi, yaitu mengungkap konsep demokrasi yang dipahami HMI MPO dalam proses penegakan demokrasi dan respon demokrasi di Indonesia.

Bab Ketiga penyusun akan menjelaskan peranan HMI MPO Cabang Yogyakarta dalam menguatkan demokrasi di Indonesia. Dalam bab ini diuraikan tentang Gerakan Mahasiswa dalam Lintasan Sejarah sebagai introspeksi peran politiknya, untuk menggambarkan kondisi politik pasca Orde Baru, dilanjutkan pembahasan mengenai peranan HMI MPO dalam mewujudkan demokrasi dari tahun 1998 sampai 2004, disini dibagi menjadi tiga masa kekuasaan, yaitu: kekuasaan masa B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri. Dan dilanjutkan melihat Optimalisasi HMI MPO Cabang Yogyakarta sebagai Gerakan Mahasiswa Islam.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi; Kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dari keseluruhan pembahasan dari awal hingga akhir dan kemudian dilanjutkan Saran-saran.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. HMI MPO tetap berasaskan Islam dengan tujuan: membentuk insan *ulul albab*, mempertahankan aqidah dan identitas Islam, dan ikut mewujudkan masyarakat yang *balдах tayyah*. Karakteristik HMI MPO berisikan unsur-unsur ideologis, yaitu komitmen tinggi terhadap Islam, aktivitasnya mengutamakan intelektual, membatasi politik praktis dan mengutamakan perkaderan. Konsep demokrasi yang digunakannya adalah suatu konsep politik yang memiliki kedaulatan rakyat terbatas, karena pada esensinya kekuasaan atau kedaulatan tertinggi hanya di tangan Allah swt.. Karena Islam adalah agama yang mengajak pada keadilan, melawan penindasan, menolak eksploitasi dan manipulasi serta membebaskan manusia dari praktek-praktek ekonomi dan politik tidak bermoral. Substansi ditegakkannya nilai dan praktek demokrasi adalah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemaslahatan umum. Dan ini secara nyata tercermin dan dipraktekkan oleh Nabi dan *al-Khulafa ar-Rasyidun* pada masa awal Islam.
2. Sebagai gerakan mahasiswa, peranan HMI MPO Cabang Yogyakarta dalam menegakkan demokrasi di Indonesia cukup memberi manfaat yang baik. Dalam kurun waktu 1998 hingga 2004 tercatat, HMI MPO Cabang Yogyakarta telah melakukan banyak hal, baik atas sendiri maupun afiliasi dengan kelompok lainnya, yaitu dengan merespon berbagai persoalan aktual saat itu serta melakukan pressure

atas kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, diantaranya dengan menggelar aksi demonstrasi, aksi keprihatinan, aksi solidaritas, diskusi dan membuat pernyataan sikap, bakti sosial. Apa yang dilakukan HMI MPO Cabang Yogyakarta ini merupakan bukti nyata, bahwa gerakan mahasiswa berperan besar dalam upaya penegakan demokrasi di Indonesia. Tidak hanya itu, gerakan yang dilakukannya pun tidak semata-mata sebagai gerakan moral, lebih dari itu juga sebagai gerakan sosial dan gerakan politik, mengingat kepedulian HMI MPO Cabang Yogyakarta dalam merespon masalah-masalah sosial politik yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat. Peranan HMI MPO Cabang Yogyakarta ini menjadi begitu penting dan berarti tatkala kelompok ini berada di tengah masyarakat. Begitu berartinya, sehingga sejarah perjalanan sebuah bangsa pada kebanyakan negara di dunia telah mencatat bahwa perubahan sosial (*social change*) yang terjadi hampir sebagian besar dipicu dan dipelopori oleh adanya gerakan perlawanan mahasiswa, termasuk di Indonesia, lebih khusus lagi yang terjadi di D.I. Yogyakarta.

B. Saran-saran

1. Sebagai kelompok yang dipercaya untuk mengusung tegaknya demokrasi di Indonesia, sudah seharusnya gerakan mahasiswa lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan kelompoknya. Selain itu, gerakan mahasiswa juga harus mempunyai konsep dan strategi yang jelas dalam upayanya menegakkan demokrasi ini, dengan kata lain gerakan mahasiswa tidak hanya sekedar mengikuti arus yang ada dan sedang terjadi apalagi sampai hanyut dalam arus sosial politik dan kekuasaan yang sedang berlangsung.

2. Supaya gerakan yang dilakukan gerakan mahasiswa lebih optimal, maka sudah seharusnya gerakan mahasiswa ikut terjun langsung dan berada di tengah-tengah masyarakat, serta bersama-sama membangun dan memberdayakan masyarakat agar lebih mengerti akan arti pentingnya penegakan demokrasi di negeri ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuni.” Theologi Responsesto Concep at Demokration and Human Righ: The case Of Contemporary Indonesian Muslim Intelektual”, studi a Islamika, vol 3, no 1, 1996
- Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1986
- AL-Mandari, Syafinuddin. *HMI dan Wacana Revolusi Sosial*. Jakarta: Hijau Hitam, 2003
- Ar-Rembangie, Nyarwi. “ Gerakan Mahasiswa di Negara Dunia ke Tiga pergulatan Format dan Arus Globalisasi”, *Trandem III*, 1 Februari 2002
- Bogdan, Robert, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992
- Dahl, Robert, *Polyarchy: Participation and Opposition* New Haven: Yale, 1973
- Darmawan, Alfia, "Politik Kaum Muda Dalam Perubahan". Dalam *Jurnal Ilmu Politik* edisi Mei 2003
- Dauglas J. Godman, George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan , Jakarta: Kencana, 2003
- Duveger, Maurice, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali Grafindo Pustaka, 1993
- Ecip, Sinansari. *Kronologi Situasi Penggulingan Soeharto*, Bandung: Mizan, 1998
- Ensiklopedi Nasional Indonesia. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989
- Fakih, Mansou, r *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial; Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Fatwa, A.M.. “ Mahasiswa Reformasi dan Masa Depan Demokrasi” Dalam *Republika*, 1 Februari 2002
- Fauzi (dkk.).” Sejarah Pergerakan , Menuntaskan Transformasi Demokratik”, *Trandem*, V, April-Juni, 2003
- Hakim, Lukaman *Revolusi Sistemik Solusi Stagnasi Reformasi dalam Bingkai Sosialisme Religius*, HMI MPO Cabang Malang, 2003
- Hasil Wawancara dengan Azwar, Ketua HMI Cabang Yogyakarta, 24 April 2005

- Haris, Syamsudin. *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*, Jakarta: LP3ES, 1995
- Hermawan, Eman dan Umaruddin Masdar. *Demokrasi untuk pemula*, Yogyakarta, KLIKR, 2000
- Hidayat, Komaruddin. *Tragedi Raja Midas moralitas Agama dan Krisis Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1998
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Grafiti, 1997
- _____, *Tertib Politik didalam Masyarakat yang sedang Berubah*, terj. Rajawali Press, Jakarta, 1983
- Karim, Rusli. *HMI MPO dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Mizan, 1997
- Kongres XXIV HMI-MPO, Semarang, 7-12 September 2003
- Kuntowijoyo. *Pengertian Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 1995
- Kusumah, Indra "Gerakan Politik Mahasiswa", dalam *Republika*, 15 Desember 2004
- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HMI MPO Cabang Yogyakarta periode 1418-1419 H./1998-1999M.
- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HMI MPO Cabang Yogyakarta Periode 1419-1420 H./1999-2000 M
- Mahardika. Timur. *Gerakan Massa Mengupayakan Demokrasi dan keadilan secara Damai*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001
- Masdar, Umaruddin. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka pelajar Yogyakarta, 1999
- Mas'oed, Mohtar. *Negara, Kapital, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1884
- Maliki, Zainuddin, *Narasi Agung; Tiga Teori Sosial Hegemonic*, Surabaya: LPAM, 2003
- Mulyono, Edi. "PRD dan Radikalisasi Mahasiswa", Basis, Mei-Juni 1999
- Mustafid, Muhamad dan kholid syeirozi." Jawaban Paradigmatik Pergerakan terhadap Globalisasi Neoliberalisme", *Trandem*, Edisi ke V April 2003
- Maududi, Abul A'la Al. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995

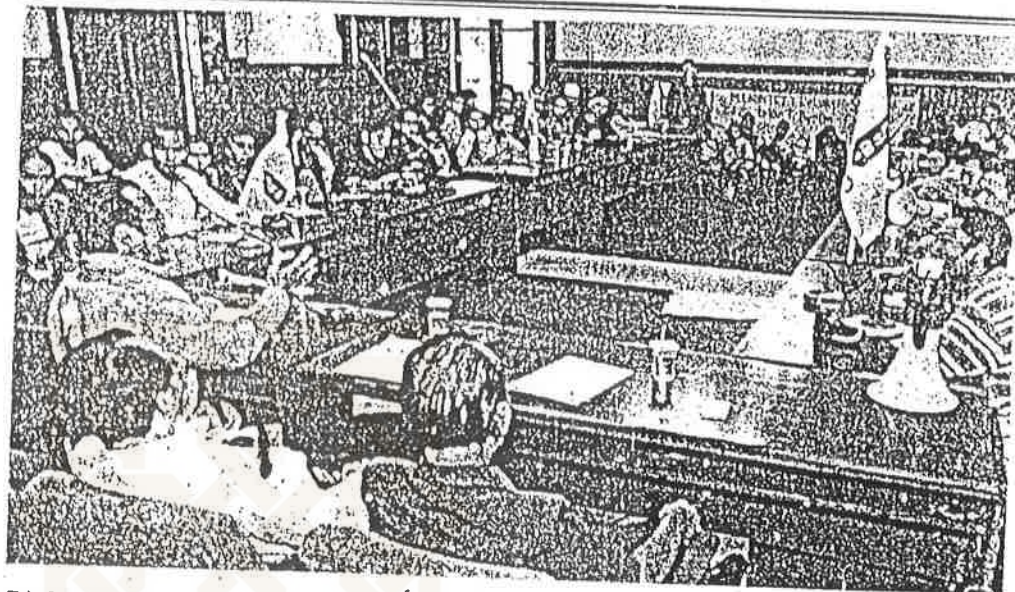
- Muthahhari. *Falsafah Pergerakan Islam*, Bandung: Mizan, 1992
- Nazir, Muh.. *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983
- Rais, Amin (dkk), *Mendayung Diantra HAM dan Demokrasi*, Senat Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Solo, 1995
- Ralf Dahrendorf, *Konflik dan konflik dalam Masyarakat Industri*, Jakarta: Rajawali, 1988
- Ritzer, George dan Douglas J. Godman. *Teori Sosiologi Modern*. terj. Alimandan, Jakarta : Kencana ,2003
- Royada, Dede (dkk.). *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003
- Sanit, Arbi. *Pergolakan Melawan Kekuasaan Gerakan Mahasiswa Antara Moral dan Politik*. Yogyakarta: INSIST Press, 1999
- Salahuddin, Odi dan Joko Utomo (ed.). *Indonesia Berkaca, Refleksi Kritis atas Perubahan*. (Yogyakarta, Forum LSM DIY, 1997
- Sitompul, Agussalim. *Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*, Jakarta: Integrita Dinamika Press, 1986
- _____, *HMI dalam Pandangan Seorang Pendeta*, Jakarta, Gunung Agung, 1982
- _____, *Citra HMI*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1986
- Sujito, Arie (dkk), "Di Tikungan Reformasi: Mahasiswa Kebingungan", Basis, Juli-Agustus, 1998
- Sumitro, Sunaryo Purwo. *Opsisi Abadi Teologi Pembrontakan Kaum Muda*, Yogyakarta, Bigraf Publishing, tt.
- Sunarto Sudarsono. "Mengubah Rancangan Bangun Demokrasi", Semmika, 1, Juli-September, 1997
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung : Remaja Rosda kariya, 2001
- Surachmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: CV. Tarsito, 1970
- _____, *Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1985
- Syariati, Ali. *Islam Mzhab Pemikiran dan Aksi*, Bandung: Mizan, 1989

Ubaidilah (ed.). Pendidikan Kewargaan Demokratisasi, HAM dan Masyarakat Madani.
Jakarta: IAIN Jakarta Perss, 2000

Uhlin, Anders. *Oposisi Berserak, Arus Deras Gelombang Demokratisasi ketiga di Indonesia*, Jakarta: Mizan, 1998

Zon, Fadli. "Gerakan Mahasiswa Dan Organisasi Kemahasiswaan Era 1990-An,"
(hmctamar@server.indo.net.id Thu, 7 Dec 1995





Dialog HMI-MPO dengan anggota dan Pimpinan DPRD DIY.

KR-EFFY WP

GARA-GARA TAK TEMUI PENGUNJUKRASA Demo HMI-MPO, Hujat F-PG DPRD DIY

YOĞYA (KR) - Gara-gara enggan ikut menemui peserta aksi yang dilakukan HMI-MPO Cabang Yogyakarta, Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPRD DIY dihujat. F-PG dinilai tidak jantan dan takut menghadapi massa. Pada kesempatan itu, HMI-MPO antara lain meminta agar DPRD DIY mendukung terhadap tuntutan agar Akbar Tandjung diadili dan perlunya dibentuk Pansus Buloggate II. Bahkan jika perlu Partai Golkar dibubarkan.

Dalam aksi yang dilakukan sekitar 100 orang dari HMI-MPO Senin (25/3) di DPRD DIY mereka sempat ditemui oleh Ketua DPRD DIY, H Surasmo Priyandono yang didampingi Krisnam (F-PDIP) dan Slamet Syaiful Muslimin (F-PAN). Sebelumnya, peserta aksi meminta agar Pimpinan Dewan bisa menghadirkan anggota F-PG agar aspirasi yang disampaikan ada artinya. Karena itu para pendemo pun ngotot untuk bisa menghadirkan anggota F-PG.

Setelah beberapa waktu ditunggu ternyata tak satu pun anggota F-PG yang nongol. Dua anggota HMI-MPO yang diantar karyawan Setwan mendatangi ruang F-PG. Keduanya ditemui Sekretaris F-PG, Ir Eddy Yanto Abdullah dan KPH H Gondhokusumo. Namun oleh dua anggota F-PG dikatakan, untuk bisa hadir dalam forum seperti itu, ada mekanisme yang harus ditempuh, yaitu harus persetujuan pimpinan fraksi. Sehingga keduanya kemudian meminta waktu untuk berkonsultasi kepada pimpinan fraksi.

Setelah ditunggu sepuluh menit tak ada ketenangan, kedua utusan pengunjukrasa kemudian mengetuk pintu ruang fraksi. Namun ternyata,

dua anggota fraksi itu menyatakan tidak bisa ikut menerima, dengan alasan pada dasarnya aspirasi itu bisa disampaikan kepada Dewan. Sedang Dewan dalam bekerja dilakukan secara kolegial.

Ketika informasi ketidakediaan FPG menerima aspirasi disampaikan, dengan serta merta peserta aksi yang dipimpin Agus Hariyanto dan Yogie Maharesi itu berteriak, "Bubarkan Golkar, Adili Akbar Tandjung, Bentuk Pansus Buloggate II,". Bahkan mereka kemudian berjanji, suatu saat akan datang lagi dan meminta Pimpinan Dewan untuk bisa menghadirkan seluruh anggota fraksi di DPRD DIY.

Bahkan dengan penolakan anggota F-PG, pengunjukrasa meminta agar Pimpinan DPRD DIY bisa memberikan sanksi politis atau sanksi moral. Meski demikian, Ketua DPRD DIY, Surasmo, menyatakan, hal itu tidak bisa dilakukan, mengingat posisi Pimpinan Dewan bukanlah seorang Kepala Dewan yang bisa menentukan segala sesuatunya.

"Untuk membuat keputusan apapun di Dewan ini, ada mekanismenya. Untuk memberi sanksi, Dewan sedang merencanakan untuk membentuk Dewan Kehormatan dan Kode Etik Dewan," jelasnya.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD DIY, HMI MPO Cabang Yogyakarta menilai, ada kecenderungan kondisi bangsa sekarang ini mengarah pada perkembangan yang tak kunjung membaik, bahkan cenderung memperpanjang ketidakstabilan kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat.

(Fik)-z



MILAD HMI — Setiap ada event akbar selalu dimanfaatkan oleh pedagang untuk mengais rejeki, di antaranya dengan menjual suvenir dan lain sebagainya. Tak terkecuali pada acara puncak peringatan Milad ke-55 HMI, di Gedung Purna Budaya, Bulaksumur, Selasa (5/2). Para pedagang, di antaranya pedagang kaos, diserbu pembeli yang sebagian besar peserta milad.

Bernas/ysr

HMI Agendakan Revolusi Sistemik

Depok, Bernas

Arah perjuangan dan gerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO ke depan akan menekankan pada upaya revolusi sistemik. Ini dimaksudkan untuk menciptakan generasi pemimpin bangsa masa datang, yang tidak terkontaminasi warisan negatif dari generasi silam.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PB HMI (MPO) Syafinuddin Al-Mandary dalam pidato politik yang disampaikan dalam acara puncak peringatan Milad ke-55 HMI, di Gedung Purna Budaya, Bulaksumur, Selasa (5/2). Acara puncak dihadiri sejumlah utusan cabang HMI (MPO) se-Indonesia, para alumni dan ratusan aktivis.

Syafinuddin menerangkan untuk merealisasikan revolusi sistemik itu ada 2 cara yang akan ditempuh HMI (MPO). Pertama,

cut generation (pemotongan generasi). Revolusi sistemik dapat diartikan dengan pemotongan generasi, melalui upaya pembentengan generasi mendatang dari proses pewarisan

Cara kedua berupa penguatan di tingkat lokal dan masing-masing daerah. Bentuknya, cabang-cabang HMI (MPO) jangan lagi berorientasi kepada Jakarta, tetapi harus lebih memperhatikan kondisi daerahnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan keinginan untuk memberdayakan kaum *mus-tadh'afin*.

Terkait dengan masalah itu, dalam periode kepengurusan kali ini HMI (MPO) akan mengembangkan kekuatan di tujuh bioregional, yaitu Andalas, Jawa, Borneo, Celebes, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Untuk sementara, pengembangan kekuatan itu akan dikoordinir 3 Badan Koordinasi (Badko), yaitu Badko Indonesia Bagian Timur, Tengah dan Barat.

Terkait masalah internasional, HMI (MPO) memandang perlunya suatu gerakan perlawanan yang revolusioner menghadapi kekuatan *neoliberalisme*. Dikatakannya, Indonesia yang secara fisik tidak diduduki bangsa asing,

Ketua HMI Cabang Yogyakarta Ma'ruf Asli Bakti dalam sambutannya menyatakan, organisasi yang telah berumur 55 tahun itu perlu meningkatkan kontribusinya kepada agama, bangsa dan negara. Ia mengingatkan, selama ini HMI belum memberikan sumbangan yang sesuai dengan harapan banyak pihak, terutama umat Islam.

Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam sambutan yang dibacakan Kamawil Hansip DIY Suwarno mengharapkan, organisasi kemasyarakatan termasuk HMI untuk mengembangkan dialog dan interaksi budaya. Harapannya, agar tercipta kristalisasi nilai-nilai budaya sebagai khasanah bangsa yang dapat dijadikan pegangan masyarakat dalam menghadapi era globalisasi.

Menurut Sultan, globalisasi di segala bidang, terutama menyangkut pasar, harus dihadapi bangsa dengan semangat persatuan dan kesatuan segenap komponen bangsa. Kalau tidak,

SIKAP 8 ELEMEN MAHASISWA YOGYAKARTA

Habibie Dinilai Gagal

YOGYA (KR) - Sedikitnya 8 elemen mahasiswa dan satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Yogyakarta, Sabtu (16/10), menolak laporan pertanggungjawaban dan pencalonan BJ Habibie sebagai presiden. Ke-8 elemen tersebut HMI Cabang Yogyakarta, HMI Cabang Bulaksumur, LMMY, Sema STIE Widya Wiwaha, AA Widya Wiwaha, DPM UII, MPM UNY, Senat UMY, dan Yayasan Lapera Indonesia.

Dalam pernyataan sikap ke-8 elemen mahasiswa dan LSM tersebut menilai laporan tersebut tidak objektif dan terkesan didramatisir, sehingga BJ Habibie telah gagal sebagai pemimpin yang tidak mempunyai kemampuan sains politik yang baik. Ditandai dengan berbagai masalah yang belum ada perbaikan. Berbagai kekerasan yang dilakukan militer terhadap mahasiswa dan pelanggaran HAM di berbagai daerah mengarah pada kebijakan disintegrasi bangsa.

Penolakan mahasiswa dan LSM terhadap Habibie tersebut sangat terkait dengan dihentikannya kasus penyidikan dan pengadilan Soeharto menjelang laporan pertanggungjawaban, artinya Habibie gagal menjalankan amanah Tap MPR yang telah ditetapkan SI MPR. Kasus skandal Bank Bali yang belum menunjukkan perkembangan yang berarti, bahkan justru terkesan dibuat berlarut-larut, Habibie tidak beriktikad baik untuk menyelesaikan masalah bangsa.

Menurut Pjs Ketua Umum HMI Cabang Bulaksumur A Sabiq pertanggungjawaban Habibie tidak layak untuk dinilai berprestasi. Karena itu HMI Bulaksumur menuntut pertanggungjawaban hukum Habibie terhadap praktik-praktik kejahatan HAM. Mengagendakan kepada pemerintah baru pengadilan terhadap kejahatan HAM di seluruh wilayah RI, terutama di Aceh.

HMI Bulaksumur juga menuntut diagendakannya perbaikan ekonomi, sistem politik yang demokratis, penghapusan peran sosial politik TNI dan pelaksanaan supremasi hukum dan pemerintahan baru. Mengamatkan kepada pemerintah baru untuk tetap melanjutkan pengusutan dan pengadilan terhadap pelaku KKN dan memperkarakan ulang (mencabut SP-3) KKN Soeharto, keluarga dan kroninya.

"HMI Bulaksumur mengamatkan kepada MPR untuk mengamandemen UUD 1945 yang mengembalikan seluruh wewenang yudikatif kepada Mahkamah Agung (MA) guna menciptakan lembaga hukum yang bebas dan merdeka, pemberdayaan MPR dan DPR dan pembatasan kekuasaan eksekutif," ujar Wakil Sekretaris Umum HMI Bulaksumur Sigit Pamungkas.

Ketua Pelaksana Yayasan Lapera Indonesia Agung Wibawanto mengatakan, pertanggungjawaban lebih menunjukkan upaya untuk menutupi kenyataan buruk yang berkembang dengan perkembangan artifisial. Apa yang disebut sebagai kemajuan ekonomi, dengan indikator makro ekonomi, pada dasarnya tidak menjawab masalah dasar bangsa yang tengah dihantam badai krisis.

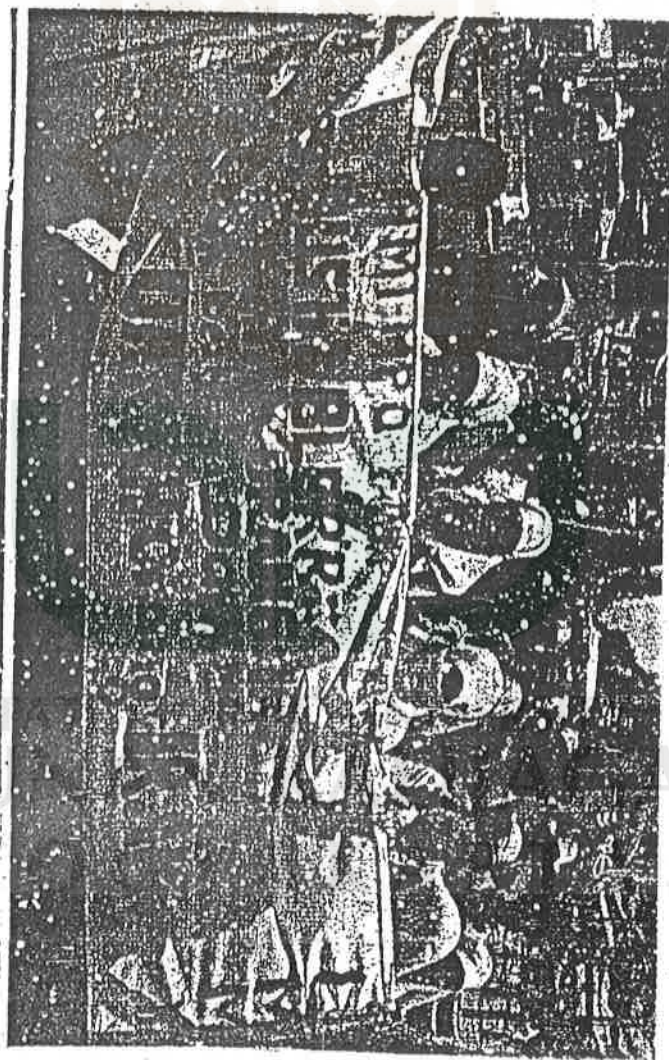
Masalah KKN Soeharto, kerja rezim transisi sama sekali tidak menunjukkan adanya kemauan politik dan kemampuan yang meyakinkan. Apa yang disampaikan Habibie lebih banyak harapan ketimbang kenyataan. Menjadi sangat manipulatif bila karya dalam membuat UU dibanggakan sebagai prestasi pemerintah. Dalam pertanggungjawaban Habibie berusaha bermain retorika untuk menutupi kelemahan dalam menjalankan reformasi.

(Asp)

MARAK DEMO MENENTANG INVASI AS

JUMAT LEGI 21 MARET 2003 (18 SURABAYA 1936)

Yogyakarta, Rakyat



Metro Yogyakarta



POLITISI BUSUK, KONDISI BURUK – Aksi damai dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam HMI MPO di Bunderan UGM, Yogyakarta Selasa (17/2). Mereka memamerkan masalah berbaagai kondisi buruk seperti bencana alam serta perilaku busuk

BERNASYURPUSO

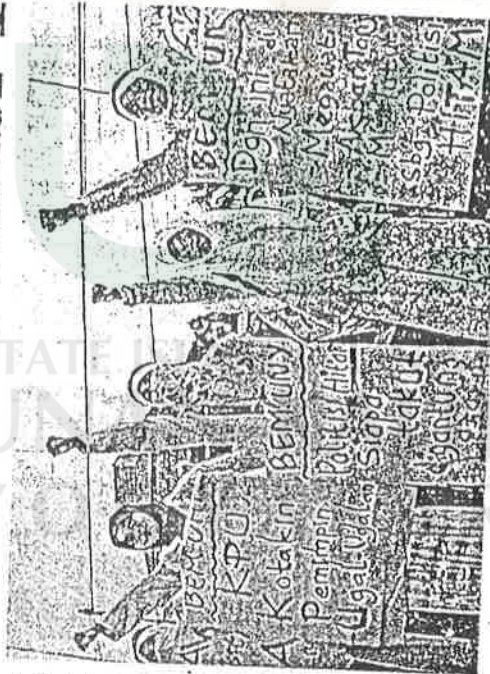
IMBAUAN ALIANSI BEM SE-YOGYA:

Jangan Pilih Politisi Tercela

YOGYA (KR) - Imbauan untuk tidak memilih politisi tercela atau busuk kembali bergaung. Kali ini, disuarakan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Yogyakarta yang merupakan gabungan dari sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di kota ini. Dalam aksinya, Rabu (14/1) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, di Jalan Gedongkuning Yogyakarta mereka menamakan diri sebagai gerakan anti Orbaisme dan Politisi Tercela.

Selain menggunakan dua bus kota dan mobil terbuka yang dilengkapi pengeras suara, para mahasiswa datang ke Kantor KPU juga menggunakan sepeda motor. Sesampai di halaman KPU, mereka langsung menggelar mimbar bebas. Mobil bak terbuka yang disediakan itu sekaligus dimanfaatkan sebagai podium. Satu demi satu para tokoh BEM langsung membarak semangati peserta unjukrasa yang mendati halaman KPU dengan beragam kecamaran terhadap politisi yang tergolong tercela dan Orbaisme alias Mbak Tutut dan Megawati. Di masa mendatang, mereka berjanji mengadakan aksi lanjutan dan sekaligus mengumumkan lagi politisi yang tergolong tercela dan Orbaisme baik di tingkat daerah maupun nasional.

Menurut mereka, Megawati dianggap politisi busuk, karena



Aktifis aliansi BEM se-Yogya saat demo di halaman KPU.

suk dalam kriteria tercela atau busuk. Diantara nama yang disebut itu adalah Akbar Tanjung, Siti Hardiyanti Indira Pukmana alias Mbak Tutut dan Megawati. Di masa mendatang, mereka berjanji mengadakan aksi lanjutan dan sekaligus mengumumkan lagi politisi yang tergolong tercela dan Orbaisme baik di tingkat daerah maupun nasional.

Menurut mereka, Megawati dianggap politisi busuk, karena

Selain membentangkan spanduk dan beberapa poster yang berisi tulisan-tulisan keras yang ditujukan kepada para politisi dan pemerintah, mereka juga berorasi secara

ajang aksi sekaligus sebagai simbolisasi, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu itu menolak pencalonan tokoh Orbaisme dan politisi tercela. "Demi penyelamatan bangsa, para politisi tercela haram untuk disalonkan," teriak mereka berapi-api.

Mereka juga mengingatkan, Orbaisme harus dipahami sebagai sebuah mentalitas atau watak yaitu korup, otoritarian, sentralisme, kekuasaan dan tidak memihak kepada rakyat. Kriteria tersebut yang dijadikan indikator untuk melakukan *political tracking* terhadap personal dan parpol yang terlibat dalam Pemilu.

Aksi diakhiri dengan doa bersama dan dipimpin salah satu mahasiswa peserta unjukrasa. Doa yang dibaca dengan intonasi menekan dan keras itu antara lain meminta kepada Tuhan agar negeri ini terbebas dari segala krisis.

Sementara itu, di tempat terpisah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Yogyakarta juga menggelar aksi unjukrasa. Mereka melewatkan sejumlah ruas jalan protokol, sehingga sempat menghambat arus lalu lintas. Jika aksi di KPU menolak politisi tercela, maka tema besar aksi yang di-angkat HMI MPO yakni ajakan untuk menolak Pemilu 2004. Mereka juga mengukir spanduk dan poster berisi kecamaran

Kamis Legi 15 Januari 2004
22 Dulkangidah 1936
Tahun LIX No. 105

Re. Halaman 2
No. 7070



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Masrda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp.512156

No : IN/I/DU/TI.03/05/2005
Lamp : 1 bendel proposal riset
Hal : Permohonan Riset

Yogyakarta, 4 Februari 2005

Kepada:
Yth. Bapak GUBERNUR KDH. PROB. DIY.
c.q. Ketua BAPPEDA dan SOSPOL

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Bersamaan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

Gerakan Mahasiswa dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia (study terhadap Peranan HMI MPO Cabang Yogyakarta dari Tahun 1998-2004)

Dapat sekiranya saudara memberi izin bagi mahasiswa kami:

Nama : Edy Supri Yanto
N I M : 00540138
Jurusan : Sosiologi Agama
Semester : X (sepuluh)
Alamat : Gg.Ori 11,Wisma Amudas,no.3, Papringan,Yk.

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat sebagai berikut :

1. Komisariat HMI MPO Cabang Yogyakarta
2. Anak Cabang yang ada di yogyakarta

Metode Pengumpulan data : Wawancara dan Dokumentasi

Adapun waktunya mulai tanggal 23 Januri s/d selesai

Atas perkenaan saudara, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tanda tangan
Mahasiswa yang bertugas

Edy/Supri Yanto
NIM:00540138



DEKAN

Drs. H. Fahmi, M.Hum
NIP: 150088748



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Masrda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp.512156

No : IN/I/DU/TI.03/05/2005
Lamp : 1 bendel proposal riset
Hal : Permohonan Riset

Yogyakarta, 4 Februari 2005

Kepada:

Yth. **Bapak GUBERNUR KDH. PROB. DIY**,
c.q. Ketua BAPPEDA dan SOSPOL

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Bersamaan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

Gerakan Mahasiswa dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia (study terhadap Peranan HMI MPO Cabang Yogyakarta dari Tahun 1998-2004)

Dapat sekiranya saudara memberi izin bagi mahasiswa kami:

Nama : Edy Supri Yanto
N I M : 00540138
Jurusan : Sosiologi Agama
Semester : X (sepuluh)
Alamat : Gg.Ori 11, Wisma Amudas, no.3, Papringan, Yk.

Untuk menngadakan penelitian (riset) di tempat sebagai berikut :

1. Komisariat HMI MPO Cabang Yogyakarta
2. Anak Cabang yang ada di yogyakarta

Metode Pengumpulan data : Wawancara dan Dokumentasi

Adapun waktunya mulai tanggal 23 Januri s/d selasai

Atas perkenaan saudara, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'a'aikum Wr. Wb.

Tanda tangan
Mahasiswa yang bertugas

Edy Supri Yanto
NIM:00540138



DEKAN

Hrs.H. Fahmi, M.Hum
NIP: 150088748



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kenari 56 Telp. 515207, 515865, 515866 Pesawat 153, 154, Fax. 554432

YOGYAKARTA KODE POS 55165

EMAIL : bappeda@jogja.go.id; EMAIL INTRANET : bappeda@intra.jogja.go.id

HOTLINE SMS : 081 2278 0001, 2740; HOTLINE TELP : (0174) 555242; HOTLINE EMAIL : upik@jogja.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/289

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala daerah istimewa Yogyakarta

Nomor : 070/640

Tanggal : 11/02/2005

Mengingat

1. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN /PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan Kepada

Nama : Edy Supriyanto NO MHS / NIM : 00540138
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ushuluddin - UIN Suka Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. Siswanto Masruri, M. Ag.
Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul : GERAKAN MAHASISWA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DI INDONESIA (Studi Terhadap Peranan HMI MPO Cabang Yogyakarta dari Tahun 1998 - 2004)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta

Waktu : 11/02/2005 Sampai 11/05/2005

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Ijin

Edy Supriyanto

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 18/02/2005
A.n. Walikota Yogyakarta
Kepala Bappeda
Bid Data, Penelitian & KAD



Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yogyakarta
4. Pimpinan HMI MPO Cabang Yogyakarta
5. Arsip.



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Masrda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

SURAT PERINTAH TUGAS RISET

Nomor: IN/IDU/TL.03/05/2004

Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan bahwa Saudara:

Nama : Edy Supri Yanto
NIM : 00540139
Semester : IX
Jurusan : Sosiologi Agama
Tempat & Tgl. Lahir : Sragen, 05 Agustus 1980
Alamat : Jl. Ori II, No. 3, Wlnd. Amudas, Pannangan, JK

Diperintahkan untuk melakukan Riset guna penyusunan sebuah Skripsi dengan:

Obyek : HMI Mpo. Cabang Yogyakarta
Tempat : Karang Kajan
Tanggal : 23 Januari 05 s/d Selesai
Metode pengumpulan Data : Observasi, Wawancara

Demikianlah, diharapkan kepada pihak yang dihubungi oleh Mahasiswa tersebut dapatlah kiranya memberikan bantuan seperlunya.

Yang bertugas

(Edy Supri Yanto)

Yogyakarta, 23 Januari 2005



Dekan
Pembantu Dekan I

H. Muza'iri, MA.
150215586

Mengetahui:

Mengetahui:

Telah tiba di
Pada tanggal

Kepala

(AZWAR M.S.)

Telah tiba di
Pada tanggal

Kepala

(AZWAR M.S.)



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 640

Membaca Surat : Dekan. F-Ushuluddin-UIN Suka
Tanggal : IN//DU//TI.03/05/2005
No :
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan kepada :
Nama : EDY SUPRI YANTO
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto-Yogyakarta
No. MHSW : 00540138
Judul : GERAKAN MAHASISWA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DI INDONESIA (Study terhadap Peranan HMI MPO Cabang Yogyakarta dari Tahun 1998-2004)

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 11 Februari 2005 s/d 11 Mei 2005

- Dengan Ketentuan :
1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
 3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
 4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
 5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
 6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

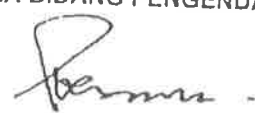
Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta, cq. Ka. Bappeda;
3. dekan F-Ushuluddin UIN Suka;
4. Peringgal;

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Februari 2005

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
U.b. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN


Ir. NANANG SUWANDI, MMA
NIP. 490 022 448



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 640

Membaca Surat : Dekan. F-Ushuluddin-UIN Suka
Tanggal : IN//DU/TL.03/05/2005
No :
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan kepada :
Nama : EDY SUPRI YANTO
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto-Yogyakarta
Judul : GERAKAN MAHASISWA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DI INDONESIA (Study terhadap Peranan HMI MPO Cabang Yogyakarta dari Tahun 1998-2004)
No. MHSW : 00540138

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 11 Februari 2005 s/d 11 Mei 2005

- Dengan Ketentuan :
1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/ Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
 3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
 4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
 5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
 6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta, cq. Ka. Bappeda;
3. dekan F-Ushuluddin UIN Suka;
4. Peringgal;

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Februari 2005

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY
U.B. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



CURRICULUM VITAE

Nama : **Edy Supri Yanto**

Tempat, Tgl Lahir : Sragen, 05 Agustus 1980

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Kawin

Nama orang tua :

Bapak : Hadi Mulyono

Ibu : Siti Lestari

Alamat di Jogja : Jl. Ori 1 Wisma Amudas Papringan, Catur Tunggal,
Depok, SLeman

Alamat Rumah : Dukuh Paingan, Desa Tegalrejo, Kec. Gondang, Kab. Sragen,
Jawa Tengah

Pendidikan : - SDN Sambu I, lulus tahun 1993
- SMPN I Gondang, lulus tahun 1996
- MAN I Sragen. Lulus tahun 1999
- UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta , Angk. 2000